



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 279 TAHUN 2015

TENTANG

**KEWAJIBAN MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN LUNAS PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah guna kelancaran pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : a. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta :

1. mewajibkan setiap pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan PTSP untuk melampirkan surat keterangan lunas pembayaran Pajak Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta; dan
2. melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam hal melaksanakan dan mensosialisasikan Instruksi Gubernur ini kepada pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di BPTSP Provinsi DKI Jakarta.

- b. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi dan seluruh Unit Pelayanan Pajak Daerah di Kecamatan Provinsi DKI Jakarta, agar menerbitkan Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Instruksi Gubernur ini.

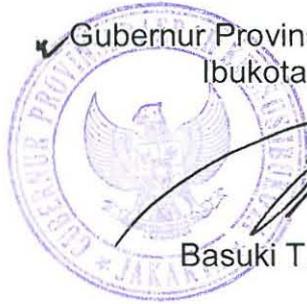
1

KEDUA : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar tidak menerbitkan izin dan/atau non izin atas permohonan yang tidak melampirkan Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 279 TAHUN 2015
Tanggal 15 Desember 2015



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
UNIT PELAYANAN PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI
Jalan Abdul Muis Nomor 66 Telepon.....
JAKARTA

Kode Pos 10160

SURAT KETERANGAN LUNAS PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL

Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi menerangkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak :

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Sampai dengan tanggal : (tanggal permohonan WP
diterima oleh UPT)

adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

Nomor Urut	NOP PBB	Tahun Pajak	Jumlah Pajak yang Dibayar	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban PBB P2

2. Pajak Kendaraan Bermotor :

Nomor Urut	Nomor Plat	Jenis Kendaraan	Tahun Pajak	Jumlah Pajak yang Dibayar	Keterangan
					Telah dilunasi untuk semua kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor

3. Pajak Air Tanah

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
		2015	Januari s.d.	Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa
		2014	Januari s.d. Desember	
		2013	Januari s.d. Desember	
		2012	Januari s.d. Desember	
		2011	Januari s.d. Desember	

4. Pajak Reklame

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban Pajak Reklame

Y

5. Pajak Hotel

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
		2015 2014 2013 2012 2011	Januari s.d. Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember	Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

6. Pajak Restoran

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
		2015 2014	Januari s.d. Januari s.d. Desember	Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

7. Pajak Hiburan

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

8. Pajak Parkir

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

9. Pajak Penerangan Jalan

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban BPHTB

K

11. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban Pajak BBNKB

12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

13. Pajak Rokok

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan
dan Layanan Informasi,

.....
NIP

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]
Basuki T. Purnama

Lampiran II : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 279 TAHUN 2015
Tanggal 15 Desember 2015



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK

UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH.....

Jalan..... Telepon.....

JAKARTA

Kode Pos.....

SURAT KETERANGAN LUNAS PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

NOMOR
TANGGAL

Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah..... menerangkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak :

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Sampai dengan tanggal : (tanggal permohonan WP diterima oleh UPT)

adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

Nomor Urut	NOP PBB	Tahun Pajak	Jumlah Pajak yang Dibayar	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban PBB P2

2. Pajak Kendaraan Bermotor :

Nomor Urut	Nomor Plat	Jenis Kendaraan	Tahun Pajak	Jumlah Pajak yang Dibayar	Keterangan
					Telah dilunasi untuk semua kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor

3. Pajak Air Tanah

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
		2015	Januari s.d.	Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa
		2014	Januari s.d. Desember	
		2013	Januari s.d. Desember	
		2012	Januari s.d. Desember	
		2011	Januari s.d. Desember	

4. Pajak Reklame

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban Pajak Reklame

K

5. Pajak Hotel

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
		2015 2014 2013 2012 2011	Januari s.d. Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember	Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

6. Pajak Restoran

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
		2015 2014	Januari s.d. Januari s.d. Desember	Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

7. Pajak Hiburan

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

8. Pajak Parkir

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

9. Pajak Penerangan Jalan

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban BPHTB

11. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban Pajak BBNKB

12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

13. Pajak Rokok

Nomor Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

Kepala Unit Pelayanan Pajak
Daerah.....,

.....
NIP

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

